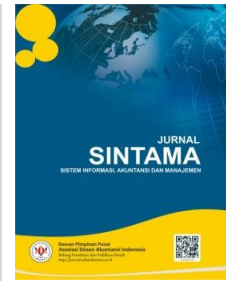




SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage:
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>



Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Ilmi Rafarni Gea¹

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan
e-mail : harnigea@gmail.com

Penulis Korespondensi. Ilmi Rafarni Gea
e-mail : harnigea@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 05 September 2021
Revisi 12 September 2021
Diterima 20 September 2021
Tersedia Online 26 September 2021

Kata kunci:

Penerapan Akuntansi Sektor Publik,
Kualitas Laporan Keuangan,
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Deli Serdang. (2) Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Deli Serdang. (3) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Deli Serdang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah 95 pegawai pada SKPD SKPD di Kabupaten Deli Serdang yang masih aktif bekerja. Kuesioner di uji validitas dan reliabilitasnya sebelum dilakukan pengumpulan data penelitian. Uji prasyarat analisis meliputi uji instrumen dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji linearitas. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (4) Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan memberi pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Received 05 September 2021
Revision 12 September 2021
Accepted 20 September 2021
Available Online 26 September 2021

Keywords:

Implementation of Public Sector
Accounting, Quality of Financial
Reports, Performance Accountability of
Government Agencies

ABSTRACT

This study was conducted to determine: (1) The Effect of Public Sector Accounting Implementation on Performance Accountability of Government Agencies in SKPD in Deli Serdang Regency. (2) The Effect of Financial Report Quality on Performance Accountability of Government Agencies at SKPD in Deli Serdang Regency. (3) The Effect of Public Sector Accounting Implementation and Quality of Financial Reports on Performance Accountability of Government Agencies at SKPD in Deli Serdang Regency. The data collection method used in this study was a questionnaire. The population in this study were 95 employees at SKPD SKPD in Deli Serdang Regency who were still actively working. The questionnaire was tested for validity and reliability before collecting research data. The analysis prerequisite test includes instrument test and classical assumption test which includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and linearity test. The data analysis method used is multiple regression analysis.

The results of this study are: (1) The application of Public Sector Accounting has a significant positive effect on the Performance Accountability of Government Agencies (2) The Quality of Financial Reports has a positive and significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies (4) The Implementation of Public Sector Accounting and the Quality of Financial Reports has a significant influence significant to the Performance Accountability of Government Agencies.

© 2021 SIMTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Abdul Halim 2018:3). Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik.

Salah satu strategi yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Pamungkas, 2012). Akuntabilitas merupakan mekanisme yang digunakan agar wewenang dan tanggungjawab berjalan selaras yang berarti bahwa orang-orang memiliki wewenang dan tanggungjawab harus melakukan pelaporan dan penjelasan mengenai tugas yang diberikan kepada atasannya (Ikhsan dkk, 2017:52). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto dalam santoso, 2008). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah selama ini disebabkan oleh banyaknya faktor, beberapa diantaranya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak dipatuhinya hukum sehingga *enforcement*-nya sangat lemah, penggunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran, lemahnya kontrol mental para pimpinan, pejabat dan pelaksana birokrasi pemerintahan. (Manggaukang raba, 2006). Mluasnya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng *image* masyarakat terhadap birokrasi publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. (surjadi, 2009)

Berbagai fenomena diatas menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya dimata publik. Ini semua terjadi karena pemerintah birokrasinya gagal menempatkan dirinya menjadi institusi yang bisa melindungi dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan publik. Praktik -praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang terjadi dalam kehidupan birokrasi telah membuat membuat birokrasi semakin jauh dari masyarakat. (dwiyanto, Agus 2002)

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi (*fraud*) merupakan salah satu faktor yang paling berdampak luas dalam kemajuan bangsa Indonesia. Akibat dari korupsi (*fraud*) yaitu lambatnya pertumbuhan pembangunan yang akan berimplikasi kepada masyarakat, karena pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan secara maksimal, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi merupakan tantangan bagi pemerintah ditangani secara serius. Salah satu cara pencegahan terjadinya praktek korupsi adalah pengembangan akuntansi sektor publik yang baik oleh Pemerintah (Pope, 2003) dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah (BPK RI,1995).

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016:13). Oleh karena itu laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (Ningtyas, 2015). Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Buruknya kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut juga buruk, yang dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia (Udiyanti,*et.al.*, 2014). Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan.

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang No.15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 UU No. 15 tahun 2004).

Tabel 1. Perkembangan opini Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017

Entitas Pemerintah	Opini				
	2013	2014	2015	2016	2017
Daerah					
Kabupaten Deli					
Serdang	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP

Sumber : BPK RI (2018)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 dan 2014 opini BPK memberikan Tidak Memberi Pendapat (TMP) ini merupakan terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan. Pada tahun 2014, 2016, dan 2017 opini BPK memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami peningkatan tetapi belum maksimal. Padahal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengharapkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Penurunan opini terjadi karena adanya kelemahan dan ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP yang mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dihasil oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang masih tidak maksimal, hal itu dikarenakan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja yang dimiliki oleh SKPD yang di kabupaten Deli Serdang. Penurunan opini ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten deli serdang yaitu AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) belum terbangun secara sempurna, dan kelemahan dalam indikator kinerja yang seharusnya dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah belum terwujud dengan baik. Dengan demikian, (Bupati) Ashari menyesal bahwa sampai saat ini laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang belum mendapatkan opini yang maksimal dari BPK. (*sumber: www.bpkp.go.id*).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, serta beberapa penelitian terdahulu. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui penerapan akuntansi sektor publik yang baik oleh instansi pemerintah serta kualitas laporan keuangan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktek korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

2. STUDI LITERATUR

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Indra Bastian (2014:6) adalah sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. Menurut Ikhsan dkk (2018 :44), Akuntansi Sektor Publik didefinisikan akuntansi dapat dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi.

Terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu: 1) untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, 2) mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan 3) memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Sedangkan Menurut Ikhsan (2018:28) tujuan akuntansi di bagi kedalam tiga bagian meliputi: 1) Informasi untuk pengambilan keputusan, 2) pengguna informasi, 3) informasi yang bermanfaat. Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Bastian (2014: 19) siklus akuntansi keuangan sektor publik antara lain:

1. Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.
2. Analisis bukti transaksi, setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
3. Pencatatan data transaksi, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.
4. Pengikhtisaran, dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan *posting*.
5. Pelaporan, selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Angreani, 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu :

1. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut.
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*)
 - b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
 - c) Tepat waktu
 - d) Lengkap
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut.
 - a. Penyajian jujur
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
 - c. Netralitas
3. Dapat dibandingkan, Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan visi dan misi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja (Sumadya dkk, 2014). Menurut Indra Bastian (2010:88) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah: “Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Tipe Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Internal, Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat /petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/ hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya

3. METODE RISET

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di seluruh SKPD yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang. Peneliti memilih SKPD Kabupaten Deli Serdang karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 30 SKPD. Sample dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sample pada penelitian ini adalah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan dan pegawai yang menjabat sebagai bendahara di 30 SKPD Kabupaten Deli Serdang yang akan penelitian teliti. Dari sample tersebut 2 orang pegawai yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden sehingga jumlah sample penelitian ini adalah $30 \times 2 \text{ orang} = 60 \text{ orang}$ responden.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

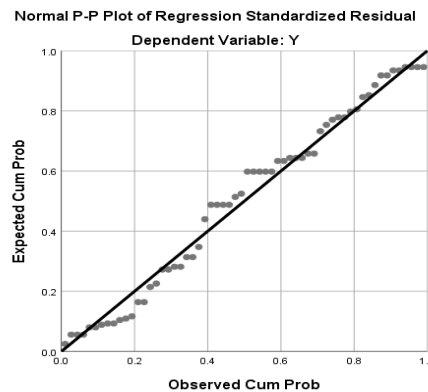
4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai SKPD di Kabupaten Deli Serdang. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 80 kuesioner dengan tingkat pengembalian 75% sehingga kuesioner yang kembali berjumlah 60 kuesioner. Dari 60 kuesioner yang dapat diolah, gambaran umum responden yang terinci pada tabel 4.1 dilihat dari jenis kelamin responden, pria 28 orang (46%) dan perempuan 32 (53%), artinya sebagian besar responden adalah perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan responden, perguruan tinggi 48 orang (80%) dan SMA/SMK 12 orang (20%), hal ini berarti sebagian besar responden adalah sarjana yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan tinggi dan mampu memahami pertanyaan dalam kuesioner dan berkompeten dalam memberikan jawaban. Serta dilihat dari lamanya responden bekerja, dari 1- 5 tahun sebanyak 17 orang (28%), 6-10 tahun 23 orang (39%) dari 11-15 tahun 20 orang (33%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah bekerja selama lebih dari lima tahun yang berarti bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja dan memahami hal- hal yang berkaitan dengan penelitian ini dalam SKPD.

4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas terhadap residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. diketahui nilai probabilitas atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 Karena nilai probabilitas p, yakni 0,200, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

Gambar 1. Uji Normalitas

2. Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006 : 58)

1. Nilai VIF dari variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah $1.139 < 10$, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Nilai VIF dari variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah $1.175 < 10$, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedasitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

1. Nilai Sig dari variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah $0,312 > 0,50$, maka diindikasikan tidak terjadi Heterodasitas
2. Nilai Sig dari variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah $0,422 > 0,50$, maka diindikasikan tidak terjadi Heterodasitas.

4. Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing -masing variabel bebas yaitu:

1. Nilai koefisien regresi dari penerapan akuntansi sektor publik adalah 0,512, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan dari akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diketahui nilai probabilitas (Sig.) dari akuntansi sektor publik, yakni $0.012 < 0,05$ dan nilai statistik t dari pengendalian internal $2.587 > \text{nilai kritis } t \ 2,002$. Maka variabel akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tingkat signifikansi 5%.
2. Nilai koefisien regresi dari kualitas laporan keuangan adalah 0,217, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan dari kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diketahui nilai probabilitas (Sig.) dari akuntansi sektor publik, yakni $0.006 < 0,05$ dan nilai statistik t dari pengendalian internal $2.231 > \text{nilai kritis } t \ 2,002$. Maka variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan

(secara statistika) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tingkat signifikansi 5%.

Uji Simultan (Uji F)

Uji bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS pada tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 6,787 dengan nilai F_{tabel} adalah sebesar 3,16. Hal ini menunjukkan nilai $F_{hitung} 6,787 > F_{tabel} 3,16$ sedangkan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan secara simultan (bersama-sama) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga, dapat disimpulkan H3 diterima

5. KESIMPULAN

Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hal tersebut menunjukkan semakin baik diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mengurangi adanya praktek fraud (korupsi) dan akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hal tersebut dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mengurangi adanya praktek fraud (korupsi) dan akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Ayu Arimetika. 2019. Analisis Penerapan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Untuk mencegah *Fraud*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Abdul Halim. 2018. Teori , Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
- BPK RI. 1995. Standar Audit Pemerintahan.
- Bano Dwi Hapsari. 2016. Anteseden Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Skripsi. Universitas Institut Agama Islam Surakarta.
- Deddi Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. ISBN: 978-979-691-322-4
- Dwiyanto, Agus . 2008. Pelayanan Publik yang Berwawasan Good Governance. Edisi Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. ISBN: 979-420-618-0
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan dkk. 2017. Akuntansi Keperilakuan. Medan : Madenatera
- Ikhsan, Arfan dkk. 2018. Teori Akuntansi. Medan : Madenatera
- Jones, P dan J.Bates. 1990. Public Sector Auditing: Practical Techniques For An Integrated Approach, London: Chapman and Hall
- Kartono, Kartini . (2002). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Rineka Cipta

- Pamungkas, Bambang. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggading*. vol: 12, No.1, April 2012
- Pope, J. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Laporan tren penindakan kasus korupsi. Tahun 2018 tahun. Indonesia Corruption Watch
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta Nugraeni dan M .Budiantara.2015. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi* , Vol.12 No.1. hal 18-32.
- Ningtyas, Fitria Novita, Agus T, Poputra dan Robert Lambey .2015. Evaluasi Penerapan Peraturan.